

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (3) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sudah sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia harus memprioritaskan jalannya pendidikan di negara Indonesia ini, karena pendidikan adalah suatu tuntutan untuk menciptakan warga negara yang baik dan paham akan segala hal yang harus dilakukan untuk menciptakan negara yang sejahtera. Untuk itu, perlu adanya pemahaman tentang pendidikan itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan ini sebagai usaha untuk menciptakan manusia yang utuh dalam artian memiliki pemahaman penuh terhadap apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Pendidikanlah yang menentukan kualitas warga negara yang menentukan jalannya hidup suatu negara. Berlangsungnya pendidikan dapat terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, baik secara disengaja ataupun tidak. Terjadinya proses pendidikan dalam

persekolahan diklasifikasikan dalam tingkatan-tingkatan dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pemahaman warga negara.

Sangatlah jelas bahwa pendidikan adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara. Pendidikan ini menunjang terhadap pemahaman warga negara akan hak dan kewajibannya, khususnya terhadap negara. Satu diantaranya pendidikan yang harus diberikan bagi warga negara dalam kaitannya dengan kehidupan kenegaraan adalah adanya pendidikan politik bagi warga negara. Kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan politik ini, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, dalam mewujudkan program pendidikan politik ini pemerintah menghadapi kendala terutama kondisi warga negara dan kondisi geografis negara ini. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melibatkan elemen-elemen masyarakat untuk membantu melaksanakan pendidikan politik bagi warga Negara, diantaranya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Mahasiswa merupakan bagian elemen penting yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara. Hal tersebut karena mahasiswa sendiri memiliki beberapa peran seperti yang diungkapkan purnama (2008: 1) yaitu antara lain “sebagai *iron stock*, sebagai *guardian of value*, dan sebagai *agent of change*”. Peran mahasiswa sebagai “*iron stock*” yaitu mahasiswa diharapkan sebagai manusia tangguh untuk masa depan. Sebagai “*guardian of value*”, mahasiswa berperan sebagai penjaga keutuhan nilai-nilai

yang hidup di masyarakat. Peran lainnya yaitu sebagai “*agent of change*”, mahasiswa mendapat tugas sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat.

Peran mahasiswa sangat diperlukan bagi negara Indonesia yang sampai kini terus diselimuti berbagai permasalahan, seperti masalah partisipasi politik masyarakat. Sebagai cerminan, dapat dilihat dari sejarah perjuangan para pemuda yang dimotori oleh para mahasiswa dalam upaya merebut kemerdekaan dan pascakemerdekaan, seperti perjuangan Ir. Soekarno dan Moch. Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama negeri ini. Perjuangan mereka sangatlah besar sampai bisa memberikan motivasi pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Perjuangan mahasiswa lainnya seperti, tragedi Malari yang ketika itu mahasiswa memperjuangkan kepentingan rakyat yang semakin menderita dan kemudian mengeluarkan tiga tuntutan yang dikenal dengan tritura (tiga tuntutan rakyat). Selain itu, ada perjuangan lainnya dari mahasiswa ini adalah gerakan reformasi ketika meruntuhkan rezim Soeharto, yang tidak lain mahasiswalah yang merupakan motornya.

Meskipun dari peristiwa-peristiwa tersebut banyak memakan korban nyawa, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan mahasiswa demi terciptanya kehidupan negara yang sejahtera. Oleh karena itu, peran mahasiswa terlebih sebagai agen perubahan (*agent of change*) sangat dibutuhkan bagi Indonesia saat ini. Dalam hal ini, peran mahasiswa yang masih murni hanya untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan golongan. Peran-peran

mahasiswa ini yang menjadi tonggak harapan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Peran mahasiswa ini didasari atas perlunya kesadaran masyarakat bagi dinamisme kehidupan Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Menurut Darmawan (2008:123) :

Demokrasi itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratien*” yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa yang populer, Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah “*the government from the people, by the people, and for the people*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kehidupan demokrasi di Indonesia ini tercermin dalam dasar negara yaitu Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Apabila dibandingkan antara bentuk pemerintahan negara ini dengan kondisi warga negaranya ternyata ada kontradiksi di dalamnya. Negara yang menganut demokrasi berpandangan bahwa kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat, sedangkan kondisi partisipasi politik masyarakat bisa dikatakan kurang.

Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan. Namun sekilas bisa dilihat, rakyat dan pemerintah seakan-akan ada jurang pemisah. Rakyat hanya berserah pada pemerintah tentang kebijakan yang mengaturnya tanpa ikut andil dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Hal ini berdampak pada perasaan tidak puas rakyat terhadap kebijakan pemerintah.

Bentuk pemerintahan demokrasi ini, rakyat atau warga negara sangatlah vital peranannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, suara rakyat

menentukan kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Macridis dalam Suhelmi (2007:30) :

Negara demokrasi ini dalam pandangan Pericles memiliki beberapa kriteria yaitu 1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung; 2) kesamaan dalam hukum, pluralism; 3) penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, pandangan; dan 4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Selain sebagai negara demokrasi, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang berkembang. Dalam sebuah negara berkembang, diperlukan partisipasi langsung dari warga negara untuk dapat mencapai tujuan negara ke arah yang lebih maju. Menurut Huntington dan Nelson (Budiardjo, 1982:2):

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam negara demokrasi dan sebagai negara berkembang, seperti Indonesia, diperlukan partisipasi penuh dari masyarakat dalam menjalankan, mempengaruhi, dan terlibat langsung dalam roda pemerintahan. Namun realita saat ini, tingkat partisipasi politik warga negara Indonesia semakin menurun saja. Hal ini bisa dilihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dalam sebuah pemilihan umum yang menyatakan tingkat golongan putih (golput) semakin bertambah dalam setiap pemilihan umum.

Melihat kasus seperti ini, sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman politik bagi masyarakat melalui pendidikan politik. Dalam buku

political education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Sadeli (2009: 19), “Hajer menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya”. Senada dengan pendapat Hajer, Kartono (2009: 64) menyebutkan bahwa:

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik sangatlah penting bagi warga negara agar dalam kehidupan bernegara bisa menjadi partisipan yang bertanggung jawab, sehingga warga negara bisa memahami proses penggunaan kekuasaan dalam menegakan aturan di lingkungan masyarakat secara umum saat menggunakan hak politiknya.

Satu diantara sarana terjadinya proses pendidikan politik khususnya bagi kalangan mahasiswa yaitu melalui organisasi kemahasiswaan. Sangat penting sekali peran dari organisasi kemahasiswaan ini bukan hanya sebagai ladang ilmu politik yang sifatnya teoretis, namun organisasi semacam ini merupakan sarana pendidikan politik yang sifatnya praksis. Kaitannya dengan pendidikan politik pada mahasiswa, Suparman seperti yang dikutip dalam Mubarak (2008: 63) menyebutkan:

Pendidikan politik berperan mensosialisasikan nilai-nilai politik yang dikandung sistem politik yang ideal. Melalui ini mahasiswa akan mempunyai standar penilaian terhadap sebuah sistem politik, dimana secara formal di tingkat tinggi yang memiliki bobot paling besar tentang materi pendidikan politik; pendidikan Pancasila. Untuk itu, pendidikan politik senantiasa bermuatan nilai-nilai yang diharapkan oleh sebuah sistem politik yang ideal, sehingga mereka dapat menginternalisasikannya

dan kepribadiannya. Dengan demikian, hasil dari penginternalisasiannya itu akan mendorong dan melahirkan tingkah laku politik yang mendukung sistem politik yang dicita-citakan.

Pendidikan politik dalam organisasi kemahasiswaan ini sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menjadi pelaku politik yang diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang baik. Selain itu, dapat membawa masyarakat secara umum untuk menciptakan sistem politik seperti itu.

Apabila diklasifikasikan, organisasi kemahasiswaan terbagi menjadi dua yaitu organisasi kemahasiswaan intrakampus dan organisasi kemahasiswaan ekstrakampus. Organisasi kemahasiswaan intrakampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan kampus dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari kampus. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa:

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi

Organisasi intrakampus ini berkecimpung dalam pergulatan politik dan melakukan kegiatan hanya sebatas lingkup kampus, seperti organisasi kerohanian, organisasi olahraga, organisasi pecinta alam, himpunan-himpunan mahasiswa, dan lainnya. Organisasi-organisasi memiliki pendanaan dari pihak perguruan tinggi yang secara teratur mengalir. Sedangkan organisasi kemahasiswaan ekstrakampus menurut Mubarok (2008: 45) adalah “wahana dan sarana meningkatkan kerja sama pengembangan ilmu dan profesi bidang studi serta menjalin persatuan dan kesatuan”.

Berbeda halnya dengan organisasi intrakampus, ruang lingkup kegiatan organisasi ini lebih luas mencakup regional dan nasional, serta pendanaannya pun bisa dikatakan tidak teratur seperti organisasi kemahasiswaan intrakampus. Artinya pendanaan organisasi ini tidak disokong oleh pihak-pihak tertentu. Hal yang menjadi keunggulan organisasi ekstrakampus ini beberapa di antaranya yaitu cakupan kegiatan sangat luas, koneksi dengan pemerintahan sangat mudah, dan menjadi kelompok penekan dan pengontrol yang cukup diperhitungkan bagi pemerintah. Satu diantaranya hal yang menjadi keunggulannya yaitu beberapa di antaranya menjadi *underbow* salah satu partai politik. Adapun organisasi ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Mahasiswa Nasional (FMN), dan lain sebagainya.

Beberapa kegiatan yang sangat penting dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah terjadinya proses pendidikan politik dan bahkan organisasi-organisasi seperti ini bisa memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan pemerintahan. Contohnya dalam proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan yang sering diikutsertakan. Tidak bisa dilupakan pula sejarah negara kita sehingga mengalami perubahan tidak lepas dari organisasi-organisasi seperti ini.

Satu contoh kecil terjadinya proses pendidikan politik dalam organisasi-organisasi ini yaitu ketika pemilihan ketua organisasi. Dalam peristiwa ini, terjadi sebuah miniatur kehidupan politik suatu negara seperti dalam sebuah pemilihan umum suatu negara demokrasi. Selain itu adanya kajian-kajian politik intensif yang juga merupakan proses pendidikan politik dalam organisasi-organisasi

seperti ini. Bisa kita lihat juga, beberapa politisi yang manggung dalam pemerintahan di negeri ini banyak di antaranya yang merupakan kader dari organisasi-organisasi seperti ini.

Melihat hal-hal demikian, organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti ini bisa kita sebut sangatlah penting keberadaannya. Bukan hanya bagi anggota organisasi saja, pendidikan politik dalam organisasi seperti ini juga berdampak pada mahasiswa lain yang bukan anggota organisasi, bahkan dalam masyarakat secara umum. Telah disebutkan sebelumnya, mahasiswa adalah pelopor bagi perubahan dan satu diantaranya bisa mengubah masyarakat yang tadinya rendah dalam hal partisipasi politiknya menjadi partisipan yang bertanggung jawab.

Sebelum menjadi pelopor bagi masyarakat secara umum, ternyata para anggota organisasi yang biasa disebut aktivis, juga dihadapkan pada permasalahan rendahnya partisipasi politik di kalangan mahasiswa. Banyak di antaranya mahasiswa yang cenderung apatis dan hedonis. Hanya memikirkan kehidupan pribadinya seakan-akan melupakan tugasnya sebagai agen perubahan. Prasyantoko (2001:50) menyebutkan:

Puncak kejayaan gerakan mahasiswa adalah pada era 98 yang dikenal dengan era reformasi. Namun pada titik ini, gerakan mahasiswa berada pada kekosongan eksistensi, setelah mengalami masa-masa ekhalasi yang luas, secara drastis ada kecenderungan terus menurun.

Meski kecenderungan terus mengalami penurunan, namun organisasi-organisasi kemahasiswaan tetap terus hidup dengan keadaan anggota yang terus mengalami penurunan. Hal ini berdampak terjadinya penurunan partisipasi politik mahasiswa dalam mempengaruhi roda pemerintahan.

Terlepas dari hal tersebut, pendidikan politik tidak lepas kaitannya dengan partisipasi politik dan sosiologi politik. Di antara tujuan pendidikan politik adalah menciptakan warga negara yang partisipan dalam kehidupan kenegaraannya dan mampu berinteraksi dengan warga negara lain dalam konteks politik. Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (Budiardjo, 2009:368) adalah “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah”. Sedangkan sosiologi politik menurut Rush dan Althoff (2011: 25) merupakan “suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik”.

Hal yang diharapkan dengan adanya pendidikan politik dalam organisasi-organisasi di atas dapat menumbuhkan partisipasi dan sosiologi politik bagi mahasiswa. Selain itu, dengan julukan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai *agent of change*, mahasiswa bisa memberikan perubahan bagi perilaku politik masyarakat agar memiliki kesadaran politik dan mampu menggunakan hak dan kewajiban politiknya dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti proses pendidikan politik dalam dunia organisasi kemahasiswaan, terlebih pada organisasi kemahasiswaan ekstrakampus atau perguruan tinggi yang dianggap sangat berpengaruh besar bagi dunia perpolitikan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Program apa saja yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
- 2) Bagaimana kurikulum pengaderan HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
- 3) Bagaimana tindak lanjut (*follow up*) dari proses pendidikan politik organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap anggota yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni)?
- 4) Bagaimana hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam melaksanakan proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
- 5) Bagaimana solusi yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui program-program yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai

upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui kurikulum penkaderan HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
- 3) Untuk mengetahui tindak lanjut (*follow up*) dari proses pendidikan politik organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI terhadap anggota yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni).
- 4) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam melaksanakan proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia.
- 5) Untuk mengetahui solusi yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan bidang ilmu politik, khususnya mengenai pendidikan politik warga negara dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara menuju kehidupan warga negara yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Praktis penelitian ini bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa dapat mengetahui tentang manfaat pendidikan politik dalam sebuah organisasi.
 - 2) Mahasiswa dapat mengetahui pentingnya partisipasi politik dalam sebuah Negara demokrasi.
- b. Manfaat praktis penelitian ini bagi lembaga yaitu sebagai berikut.
 - 1) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian bagaimana pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa.
 - 2) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kegiatan mahasiswa.
- c. Manfaat praktis penelitian bagi masyarakat.

Masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan di negara demokrasi seperti Indonesia ini.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini menyangkut berbagai aspek yang cukup banyak dan kompleks. Sebagai langkah untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini dan untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan istilah-istilah, maka perlu adanya batasan istilah seperti berikut.

1. Demokrasi

Menurut Darmawan (2008: 123), “demokrasi itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratien*” yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa yang populer, Abraham Lincoln

mengatakan bahwa demokrasi adalah “*the government from the people, by the people, and for the people*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

2. Partisipasi politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Budiardjo (1982: 2) mengatakan :

“partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”.

3. Pendidikan politik

Hajer menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya. (Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Elly Hasan Sadeli, dkk, 2009:19). Pendidikan politik sangat penting dalam membentuk warga negara yang melek politik sehingga dapat menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam sebuah pemerintahan baik langsung atau tidak langsung. Kartini Kartono (2009:64) menyebutkan bahwa: pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

4. Organisasi mahasiswa

Organisasi mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan minatnya. Organisasi ini merupakan sarana pendidikan non formal bagi mahasiswa. Dalam pandangan politik, organisasi ini merupakan miniatur sebuah negara, sehingga mahasiswa mendapat pendidikan politik dan mempraktikkan pendidikan politik tersebut dalam sebuah miniatur negara tersebut.

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (kepmendikbud No. 155/U/1998). Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus atau perguruan tinggi menurut mubarak (2008) adalah “wahana dan saran meningkatkan kerja sama pengembangan ilmu dan profesi bidang studi serta menjalin persatuan dan kesatuan”.

F. Metode dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengambil pendekatan ini berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pendidikan terjadi dalam organisasi untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik. Sehingga peneliti memerlukan pengkajian dan memperoleh gambaran yang mendalam.

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Hal ini untuk menggambarkan proses pendidikan politik dalam organisasi dalam menumbuhkan

dan meningkatkan partisipasi politik warga Negara Indonesia khususnya di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengetahui gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan dan angka statistik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan peneliti meliputi wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur.

a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2010: 231) mengatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara ini dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden (informan) secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan tanya jawab dengan responden, yaitu ketua dan perwakilan pengurus organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI, serta perwakilan dari mahasiswa UPI yang bukan merupakan anggota dari organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semiberstruktur. Hal ini dilakukan agar responden lebih terbuka terhadap permasalahan, karena responden lebih banyak dimintai informasi yang sifatnya pendapat.

b. Observasi

Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti terjun langsung di lapangan dalam melakukan penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati atau meneliti bagaimana terjadinya proses pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut bagaimana terjadinya proses pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI, baik itu dalam bentuk kajian ataupun bentuk kegiatan lainnya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya proses pendidikan politik dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik anggota organisasi.

c. Studi dokumen

Sugiyono (2010: 240) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dalam penelitian ini, studi dokumen dapat memberi dukungan terhadap data dari hasil wawancara dan observasi, sehingga data akan lebih terpercaya.

d. Studi literatur

Studi literatur ini yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber yang berhubungan dengan pendidikan politik dan partisipasi politik. Studi literatur ini dimaksudkan

untuk memperoleh data teoretis sehingga memperkuat data yang diperoleh dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengadakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur, langkah lain yang juga penting dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data. Menurut Sugiyono (2010:244), “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:246), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas”. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang ditemukan di lapangan akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu, data tersebut perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sebagai langkah selanjutnya yaitu analisis data melalui reduksi data. Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, maka data menjadi terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan penyajian data ini akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion drawing / verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini mungkin akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah disebutkan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Demikian prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini. Melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan penelitian ini dapat diperoleh data yang memenuhi kriteria penelitian yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Bumi Siliwangi. Alasan pengambilan lokasi karena di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Bumi Siliwangi ini pendidikan politik mahasiswa dilihat sepintas sangatlah kurang, yang berdampak pada kurangnya partisipasi politik mahasiswa. Contoh kecil yaitu dalam pemilihan ketua BEM REMA UPI. Peneliti

beranggapan hal ini berdampak pada partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum. Selain itu, semakin menurunnya pula partisipasi politik mahasiswa UPI dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut.

- a. Ketua organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI.
- b. Pengurus dari masing-masing organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI.